



## Sekadau Kembali Raih WTP DPP



**MENERIMA** - Bupati Sekadau menerima LHP BPK RI dari kepala BPK RI perwakilan kalbar di kantor BPOAK.

**PONTIANAK TRIBUN** - Untuk kedua kalinya, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan keuangan Pemkab Sekadau pada Tahun 2013 kini kembali tahun Tanpa Pengucualian dengan paragraf penjelasan (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalimantan, Senin (9/6) di Aula Kantor BPK RI Kalbar.

Didi Budi Satrio Kepala BPK RI Wilayah Kalbar dalam sambutannya pada penyerahan atas laporan kepada pemerintah daerah yang mendapat WTP bernilai agar apa yang tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.

"Semoga dengan apa yang dicapai bermanfaat dalam tercapainya pemerintahan yang baik, Transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan keuangan pemerintahan daerah," Katanya.

Simon Petrus, S.Sos, M.Si Bupati Sekadau mengatakan Pemda Sekadau dalam melaksanakan pembangunan terencana ma berkaitan keuangan dari pemerintah Pusat dia wasi oleh baik dari masyarakat, LSM maupun BPK itu sendiri.

Terkait opini wajar tanpa pengucualian dengan paragraf penjelasan (WTP) yang diraih pemerintah Kab. Sekadau dibawah pimpinannya ia mengatakan capaian tersebut merupakan buah dari kerja keras dan keseriusan oleh semua elemen SKPD dalam penyelenggaraan pemerintah.

Selain itu meski mendapat opini WTP DPP yang Kedua ia berharap semua SKPD jangan merasa puas melainkan terus memacu lagi menuju perbaikan yang lebih optimal.

"Semua itu adalah kerja keras semua pihak termasuk SKPD dan itu perlu diperbaiki lagi. Akan tetapi ingin saya jelaskan terkait aset kita lagi dan terus berkoordinasi dengan kabupaten induk bagaimana persoalan terkait laporan kita masih terkendala waktu sedangkan pelaporan harus dilakukan. Sebenarnya sudah dilakukan. Kita Simoni.

Isnaini, S.IP M.Si wakil

SKPD dan elemen pemerintahan lainnya. Kita masih terus mengharapakan apa yang diraih itu tidak menjadikan kita puas sampai di situ saja melainkan terus lagi meruju penyempurnaan dan itu harus dijadikan motivasi untuk lebih baik lagi," Katanya

Simon juga mengakui ada beberapa catatan terhadap laporan seperti asset yang masih belum diinventarisir dan sebagainya.

"Ada catatan dan itu perlu diperbaiki lagi. Akan tetapi ingin saya jelaskan terkait aset kita lagi dan terus berkoordinasi dengan kabupaten induk bagaimana persoalan terkait laporan kita masih terkendala waktu sedangkan pelaporan harus dilakukan. Sebenarnya sudah dilakukan. Kita Simoni.

Isnaini, S.IP M.Si wakil

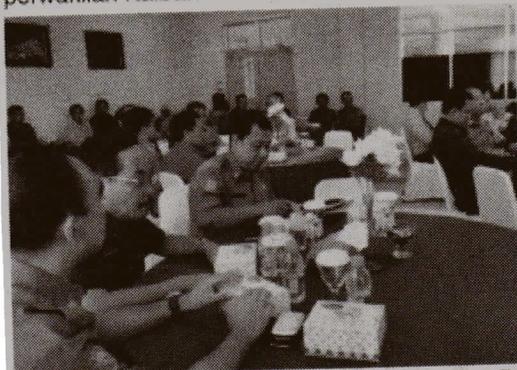
ketua DPRD Sekadau yang mewakili Ketua DPRD untuk hadir dalam penyerahan laporan oleh BPK RI Wilayah Kalbar mengapresiasi terhadap capaian Pemkab Sekadau yang kedua kalinya berturut-turut mendapat opini WTP DPP.

"Kita sangat apresiasi, semua itu merupakan hasil yang baik. Itu tentunya tidak terlepas dari koordinasi yang baik dilakukan eksekutif dan legeslatif. Kami setiap penyerahan LHP pertahun selalu merekomendasikan agar jangan malu bertanya kepada BPK RI terkait mekanisme pelaporan.

Selain itu memang selalu ditekankan agar setiap penyerahan laporan pemerintah harus sesuai ketentuan UU yang berlaku dan itu sudah dilakukan dan itu sudah ditukarkan Pemkab," Katanya saat ditemui Tribun usai acara penyerahan laporan. (ded)



**IKUT** - Sekda Kab. Sekadau bersama kepala BPKAD ikut menghadiri acara penyerahan LHP perwakilan Kalbar.



**SUASANA** - Suasana di aula kantor BPK RI perwakilan kalbar pada saat penyerahan LHP.



**SAMBUTAN** - Wakil ketua DPRD kabupaten Sekadau menyampaikan sambutan mewakili empat kabupaten yang menerima LHP.



**MENANDATANGANI** - Kepala BPK RI Kalbar menandatangani berita acara penyerahan LHP BPK RI Kalbar untuk empat kabupaten yaitu Kab. Sekadau, Kab. Pontianak, Kab. Kapuas Hulu dan Kab. Sintang.



**FOTO BERSAMA** - Bupati, Sekda, Kepala Inspektorat Kab. Sekadau dan Sintang dan wakil ketua DPRD sekadau foto bersama usai menerima LHP di kantor BPOK RI kalbar.



**MENANDATANGANI** - Bupati Sekadau menandatangani berita acara penyerahan LHP BPK RI Kalbar di aula kantor BPK RI perwakilan kalbar.



**FOTO BERSAMA** - Bupati Sekadau bersama Bupati Pontianak, Kapuas Hulu, Sintang dan ketua BPK RI perwakilan Kalbar foto bersama.